

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

Ginanjara Wira Saputra^{1*}, Pandji Santosa², Josy Adiwisatra³

Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia^{1,2}

Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia³

E-mail: ginanjara.wira.saputra.s3@unla.ac.id

ABSTRAK

Masalah pengelolaan sampah di Kota Bandung telah mencapai tingkat yang krusial, ditandai dengan volume sampah harian yang melampaui kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kota Bandung untuk mengimplementasikan serangkaian kebijakan yang bertujuan mengurangi sampah dari sumbernya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan program pengelolaan sampah di Kota Bandung, dengan fokus pada program "Kang Pisman" (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan) menggunakan kerangka analisis Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III yang mencakup empat variabel kunci: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis dokumen untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan. Keterbatasan metodologis ini mengimplikasikan bahwa analisis lebih berfokus pada aspek regulasi dan struktural, sementara dimensi perilaku masyarakat dan dinamika implementasi di tingkat lapangan dikaji melalui dokumen kebijakan dan laporan resmi, bukan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun implementasi didukung oleh landasan hukum yang kuat seperti Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 dan berbagai Perwal, efektivitasnya terhambat oleh komunikasi yang belum merata hingga tingkat rumah tangga, keterbatasan infrastruktur dan anggaran, serta variasi disposisi pelaksana dan masyarakat. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada penerapan sistematis Model Edwards III dalam konteks desentralisasi pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia, yang memperkaya literatur implementasi kebijakan publik dengan mengidentifikasi bahwa keberhasilan program inovatif berbasis partisipasi masyarakat memerlukan penyesuaian simultan keempat variabel implementasi. Implikasi praktisnya adalah perlunya penguatan komunikasi berbasis lokalitas, alokasi sumber daya yang lebih proporsional, dan pembentukan mekanisme koordinasi lintas sektoral untuk meningkatkan efektivitas program pengelolaan sampah berkelanjutan di kota-kota metropolitan Indonesia.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Kang Pisman, Kebijakan Publik, Kota Bandung*

ABSTRACT

The waste management problem in Bandung City has reached a critical level, marked by daily waste volume exceeding the capacity of the Sarimukti Final Disposal Site (TPA). This condition has prompted the Bandung City Government to implement a series of policies aimed at reducing waste at its source. This study aims to analyze the implementation of waste management program policies in Bandung City, focusing on the "Kang Pisman" (Reduce, Separate, Utilize) program using the analytical framework of the George C. Edwards III Policy Implementation Model which includes four key variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The method used is a qualitative approach with literature studies and document analysis to collect relevant secondary data. This methodological limitation implies that the analysis focuses more on regulatory and structural aspects, while the dimensions of community behavior and implementation dynamics at the field level are examined through policy documents and official reports, rather than direct observation. The results of the study indicate that although implementation is supported by a strong legal basis such as Regional Regulation No. 9 of 2018 and various mayoral regulations, their effectiveness is hampered by unequal communication down to the household level, limited infrastructure and budget, and varying dispositions of implementers and the community. The theoretical contribution of this research lies in the systematic application of the Edwards III Model in the context of decentralized urban waste management in Indonesia, which enriches the public policy implementation literature by identifying that the success of innovative, community-based programs requires the simultaneous alignment of all four implementation variables. The practical implications are the need to strengthen locality-based communication, more proportional resource allocation, and the establishment of cross-sectoral coordination mechanisms to improve the effectiveness of sustainable waste management programs in Indonesian metropolitan cities.

Keywords: *Policy Implementation, Waste Management, Kang Pisman, Public Policy, Bandung City*

PENDAHULUAN

Urbanisasi yang pesat di kota-kota besar Indonesia telah membawa konsekuensi kompleks, salah satunya

adalah peningkatan volume sampah yang signifikan. Fenomena ini menjadi salah satu tantangan paling mendesak dalam manajemen perkotaan modern, di

mana pertumbuhan jumlah penduduk dan perubahan gaya hidup konsumtif secara langsung berkorelasi dengan jumlah limbah padat yang dihasilkan setiap hari. Kota Bandung, sebagai kota metropolitan terbesar ketiga di Indonesia dengan populasi mencapai 2,5 juta jiwa (BPS Kota Bandung, 2023), menghadapi permasalahan krusial dalam pengelolaan sampah. Tabel 1 menunjukkan kondisi pengelolaan sampah Kota Bandung yang mencerminkan ketidakseimbangan antara produksi dan kapasitas pengolahan sampah.

Tabel.1 Profil Pengelolaan Sampah Kota Bandung Tahun 2022-2023

Indikator	Nilai	Sumber
Populasi Kota Bandung	2,5 juta jiwa	BPS Kota Bandung (2023)
Volume Sampah Harian	1.594 ton/hari	DLH Kota Bandung (2022)
Timbulan Sampah Per Kapita	0,435 kg/kapita/hari	DLH Kota Bandung (2022)
Kapasitas TPA Sarimukti untuk Kota Bandung	868 ton/hari	DLH Kota Bandung (2022)
Defisit Pengelolaan Sampah	726 ton/hari	Hasil Kalkulasi
Persentase Defisit	45,5%	Hasil Kalkulasi

Sumber: Olahan Peneliti (2025)

Data Tabel 1 dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung menunjukkan bahwa setiap harinya kota ini memproduksi sekitar 1.594 ton sampah, dengan rata-rata timbulan sampah per kapita mencapai 0,435 kg/hari (DLH Kota Bandung, 2022). Volume ini terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi, memberikan tekanan luar biasa pada infrastruktur lingkungan yang ada, terutama kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti

yang hanya mampu menampung sekitar 868 ton per hari dari Kota Bandung. Kesenjangan antara produksi dan kapasitas pengolahan ini menciptakan defisit sekitar 726 ton sampah per hari yang harus dikelola secara alternatif. Isu ini bukan sekadar masalah teknis kebersihan, melainkan telah berkembang menjadi masalah sosial, ekonomi, dan kesehatan publik yang memerlukan intervensi kebijakan yang efektif dan terstruktur.

Pemerintah, dalam perannya sebagai regulator dan fasilitator utama, memegang tanggung jawab krusial untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang mampu mengatasi masalah ini secara komprehensif. Dalam kerangka administrasi publik, keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya diukur dari kualitas dokumen perencanaan, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut dapat dilaksanakan di lapangan dan memberikan dampak nyata (Saputra, Kurniawati, et al., 2024). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah menjadi ujian bagi kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya, mengkoordinasikan berbagai aktor, dan mendorong perubahan perilaku di tengah masyarakat. Kegagalan dalam implementasi tidak hanya akan memperburuk krisis sampah, tetapi juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah, sebagaimana ditemukan dalam studi mengenai hubungan antara kualitas

pelayanan dan kepuasan masyarakat (T. G. Dewi et al., 2024). Dalam konteks ini, studi implementasi kebijakan menjadi sangat relevan, khususnya melalui pendekatan Model George C. Edwards III yang menekankan empat variabel kunci: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai determinan keberhasilan implementasi (Edwards, 1980).

Pemerintah Kota Bandung telah merespons tantangan ini dengan mengeluarkan serangkaian regulasi yang menjadi landasan hukum bagi upaya pengelolaan sampah. Salah satu produk hukum utamanya adalah Peraturan Daerah Kota Bandung No. 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, yang diperkuat melalui berbagai Peraturan Walikota (Perwal) yang mengatur aspek teknis di lapangan. Sebagai ujung tombak implementasi, pada tahun 2018 diluncurkan program inovatif "Kang Pisman" (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan) yang menandai pergeseran paradigma dari pendekatan konvensional "kumpul-angkut-buang" menjadi pengelolaan sampah berbasis sumber dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat sejak tingkat rumah tangga. Program ini sejalan dengan prinsip hierarki pengelolaan sampah berkelanjutan yang memprioritaskan pengurangan, pemilahan, dan pemanfaatan sebelum pembuangan akhir (Tchobanoglous et al., 2021).

Meskipun demikian, jalan menuju pengelolaan sampah yang ideal tidaklah

mudah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik sering kali menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan anggaran, resistensi dari kelompok sasaran, hingga masalah koordinasi antar-lembaga (Agustino, 2020). Studi terdahulu mengenai implementasi regulasi di tingkat kota, seperti yang dilakukan oleh (Suarha et al., 2024) mengenai implementasi Perwal di Cimahi, menunjukkan bahwa keberhasilan sangat bergantung pada kejelasan petunjuk teknis dan konsistensi penegakan di lapangan. Penelitian (Y. F. Dewi et al., 2024) tentang penegakan Perwal terhadap pedagang kaki lima di Kota Bandung juga menekankan pentingnya peran aparat dalam memastikan kepatuhan publik. Sementara itu, studi mengenai inovasi layanan publik (Saputra, Suarha, et al., 2024) dan kinerja pegawai (Ningrum et al., 2023; Sulistiani et al., 2024) menunjukkan bahwa faktor internal organisasi seperti kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, motivasi, dan disiplin kerja menjadi determinan penting keberhasilan program pemerintah.

Namun demikian, kesenjangan penelitian (*research gap*) masih teridentifikasi dalam literatur yang ada. Pertama, meskipun banyak penelitian mengkaji pengelolaan sampah dari perspektif teknis atau partisipasi masyarakat secara parsial, belum banyak studi yang secara komprehensif

menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah dengan menggunakan kerangka teoretis implementasi kebijakan yang sistematis seperti Model Edwards III dalam konteks desentralisasi pemerintahan daerah di Indonesia. Kedua, program "Kang Pisman" sebagai inovasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat belum banyak dikaji secara akademis dari sudut pandang implementasi kebijakan publik, khususnya dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memfasilitasi atau menghambat keberhasilannya di lapangan. Ketiga, studi-studi terdahulu cenderung bersifat sektoral dan belum mengintegrasikan dimensi komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, disposisi implementor dan masyarakat, serta struktur birokrasi secara simultan dalam satu kerangka analisis.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara mendalam implementasi kebijakan program pengelolaan sampah di Kota Bandung, dengan fokus pada program "Kang Pisman", melalui penerapan Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III. Secara spesifik, penelitian ini akan:

- (1) menganalisis bagaimana komunikasi kebijakan ditransmisikan dari tingkat pembuat kebijakan hingga masyarakat sebagai target sasaran;

- (2) mengevaluasi ketersediaan dan kecukupan sumber daya (manusia, anggaran, infrastruktur, dan kewenangan) dalam mendukung implementasi;
- (3) mengidentifikasi disposisi atau sikap para implementor dan masyarakat terhadap program; dan
- (4) mengkaji struktur birokrasi dan mekanisme koordinasi antar-lembaga dalam pelaksanaan program.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tiga kontribusi utama: pertama, kontribusi teoretis berupa pengayaan literatur implementasi kebijakan publik di Indonesia melalui aplikasi Model Edwards III dalam konteks kebijakan lingkungan dan desentralisasi; kedua, kontribusi empiris berupa identifikasi faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi program pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat; dan ketiga, kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Kota Bandung dan kota-kota lain di Indonesia yang menghadapi permasalahan serupa dalam upaya mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahapan krusial dalam siklus kebijakan publik. Tahap ini adalah

proses di mana sebuah kebijakan yang telah dirumuskan dan disahkan kemudian diwujudkan menjadi tindakan nyata oleh badan-badan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Van Meter & Van Horn, 1975) mendefinisikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik pemerintah maupun swasta, yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Dengan kata lain, implementasi adalah jembatan yang menghubungkan antara harapan pemerintah yang tertuang dalam regulasi dengan realitas yang dirasakan oleh masyarakat.

Keberhasilan sebuah kebijakan tidak ditentukan oleh kualitas perencanaannya semata, melainkan oleh efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Kegagalan sering kali bukan terjadi pada tahap perumusan, tetapi pada tahap implementasi (Agustino, 2020). Proses ini melibatkan serangkaian aktivitas yang kompleks, termasuk penafsiran ulang kebijakan, pengorganisasian sumber daya, dan pelaksanaan kegiatan operasional. Dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, implementasi kebijakan menjadi sangat dinamis karena melibatkan berbagai tingkat pemerintahan dan aktor non-pemerintah, yang memerlukan manajemen yang cermat dan adaptif (Saputra et al., 2025). Oleh karena itu, menganalisis proses implementasi menjadi penting untuk memahami

mengapa sebuah kebijakan berhasil atau gagal.

Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III

Untuk menganalisis implementasi kebijakan program pengelolaan sampah di Kota Bandung, penelitian ini mengadopsi kerangka teori dari (Edwards, 1980). Model ini dianggap relevan karena sifatnya yang komprehensif dan fokus pada faktor-faktor prasyarat yang secara langsung memengaruhi keberhasilan implementasi. Edwards III mengemukakan bahwa agar implementasi kebijakan berhasil, diperlukan pemenuhan empat variabel kunci, yaitu:

1. **Komunikasi (*Communication*):** Variabel ini menekankan bahwa implementor harus mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan. Agar implementasi berjalan efektif, instruksi kebijakan harus ditransmisikan secara jelas, konsisten, dan akurat kepada para pelaksana di lapangan. Dalam konteks program "Kang Pisman", komunikasi mencakup sosialisasi Perda dan Perwal kepada aparat di tingkat kecamatan dan kelurahan, serta kepada masyarakat sebagai sasaran utama. Ketidakjelasan informasi dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahan dalam pelaksanaan program pemilahan sampah.
2. **Sumber Daya (*Resources*):** Keberhasilan implementasi sangat

bergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai. Sumber daya ini tidak hanya mencakup anggaran finansial, tetapi juga sumber daya manusia (jumlah dan kompetensi staf), fasilitas (seperti pusat daur ulang, kendaraan pengangkut sampah terpilah), dan kewenangan formal untuk bertindak. Tanpa sumber daya yang cukup, implementor tidak akan mampu melaksanakan tugasnya secara optimal. Kinerja pegawai yang didukung oleh motivasi dan disiplin menjadi salah satu kunci dalam optimalisasi sumber daya manusia (Saputra, 2018; Sulistiani et al., 2024).

3. Disposisi atau Sikap (*Dispositions*): Variabel ini merujuk pada sikap, kecenderungan, atau respons para pelaksana terhadap kebijakan. Jika implementor memiliki disposisi yang positif dan komitmen yang tinggi untuk menjalankan kebijakan, kemungkinan besar implementasi akan berhasil. Sebaliknya, jika mereka menolak atau tidak setuju dengan isi kebijakan, mereka mungkin akan menghambat pelaksanaannya. Disposisi ini dipengaruhi oleh persepsi implementor terhadap kebijakan, kepentingan pribadi, dan budaya organisasi tempat mereka bekerja (Ningrum et al., 2023).
4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*): Struktur organisasi

pelaksana juga memainkan peran penting. Struktur birokrasi yang mendukung ditandai dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan tidak berbelit-belit, serta pembagian wewenang dan tanggung jawab yang tegas antar unit organisasi. Fragmentasi dalam struktur birokrasi, di mana koordinasi antar lembaga lemah, dapat menjadi penghalang serius bagi keberhasilan implementasi.

Keempat faktor ini saling berkaitan dan secara kolektif menentukan tingkat keberhasilan atau kegagalan implementasi sebuah kebijakan. Model Edwards III ini memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk menganalisis implementasi program pengelolaan sampah di Kota Bandung.

Teori Pemerintahan Daerah dan Desentralisasi

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia yang didasarkan pada prinsip desentralisasi memberikan otonomi kepada pemerintah lokal untuk mengelola sebagian besar urusan publik, termasuk masalah pengelolaan sampah. (Saputra et al., 2025) menjelaskan bahwa desentralisasi menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah untuk memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal mereka. Dalam konteks Kota Bandung, desentralisasi pengelolaan sampah

melalui program Kawasan Bebas Sampah (KBS) merupakan upaya mengadopsi prinsip ini untuk melibatkan masyarakat tingkat RW dalam pengelolaan sampah.

Teori *good governance* menekankan bahwa pemerintah harus menjalankan administrasinya dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan efektivitas (Destriana et al., 2023). Dalam penerapannya, pemerintah daerah tidak hanya bertindak sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai fasilitator dan koordinator yang melibatkan berbagai stakeholder. Penelitian (Destriana et al., 2023) tentang pengaruh implementasi e-government terhadap kinerja pegawai menunjukkan bahwa inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Pembelajaran ini relevan untuk program inovatif seperti Kang Pisman yang memerlukan koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup, UPTD Pengelolaan Sampah, kelurahan, RW, dan komunitas masyarakat.

Manajemen Sampah Padat dan Pengelolaan Berkelanjutan

Pengelolaan sampah padat merupakan bagian integral dari manajemen sumber daya dan lingkungan perkotaan. Secara konseptual, pengelolaan sampah berkelanjutan mengikuti prinsip hierarki sampah yang terdiri dari: pengurangan di sumber (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), daur ulang

(*recycle*), pemrosesan energi, dan pembuangan akhir (*disposal*) (Tchobanoglous et al., 2021). Program Kang Pisman yang diimplementasikan di Kota Bandung sejalan dengan prinsip ini, khususnya dalam tiga tahap awal: mengurangi jumlah sampah, memisahkan sampah organik dari anorganik, dan memanfaatkan sampah untuk keperluan tertentu seperti kompos atau bahan daur ulang.

Tantangan utama dalam pengelolaan sampah perkotaan di kota-kota berkembang seperti Bandung adalah ketidakseimbangan antara volume sampah yang dihasilkan dengan kapasitas infrastruktur pengelolaan. Dengan pertumbuhan penduduk yang cepat dan perubahan pola konsumsi, volume sampah di kota-kota Indonesia terus meningkat, sementara pembangunan TPA baru menghadapi berbagai kendala sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, strategi pengelolaan sampah harus bersifat komprehensif, melibatkan pengurangan volume melalui partisipasi masyarakat dan inovasi dalam pengolahan sampah di tingkat lokal. Penelitian tentang identifikasi timbulan dan komposisi sampah rumah tangga di Bandung menunjukkan bahwa sekitar 44,52% sampah rumah tangga adalah sisa makanan (sampah organik) yang sebenarnya dapat dimanfaatkan melalui proses pengomposan.

Partisipasi Masyarakat dan Perilaku Pengelolaan Sampah

Keberhasilan program pengelolaan sampah yang berorientasi pada pengurangan di sumber sangat bergantung pada perubahan perilaku dan peningkatan partisipasi masyarakat. Menurut teori perubahan perilaku, adopsi perilaku baru memerlukan kombinasi antara pengetahuan, sikap yang positif, dan lingkungan yang mendukung (Bandura, 1977). Dalam konteks pengelolaan sampah, masyarakat perlu memahami pentingnya pemilahan sampah, memiliki sikap yang peduli terhadap lingkungan, serta didukung oleh infrastruktur dan regulasi yang jelas.

Program edukasi seperti Sekolah Kang Pisman yang didirikan oleh Pemerintah Kota Bandung merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat. Demikian pula, penelitian (Rahmania et al., 2024) mengenai pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja pegawai menunjukkan bahwa budaya yang positif dapat meningkatkan komitmen individu terhadap tujuan organisasi. Pembelajaran ini dapat diterapkan dalam menciptakan budaya pengelolaan sampah yang sehat di masyarakat melalui sosialisasi dan penguatan nilai-nilai lingkungan.

Kinerja Implementasi dan Evaluasi Program

Kinerja dalam implementasi kebijakan dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti tingkat pencapaian target, efisiensi penggunaan sumber daya, serta dampak atau outcome dari

program yang dijalankan (Saputra, 2018). Penelitian (Sulistiani et al., 2024) menunjukkan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai, yang secara implisit juga menunjukkan bahwa konsistensi dan kepatuhan terhadap standar prosedur adalah penting dalam mencapai hasil yang diharapkan.

Dalam konteks program pengelolaan sampah, evaluasi dapat dilakukan dengan melihat perubahan volume sampah yang terangkut ke TPA, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilahan, keberhasilan pembentukan Kawasan Bebas Sampah, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap program. Studi mengenai kepuasan masyarakat, seperti penelitian (T. G. Dewi et al., 2024) tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan, menunjukkan bahwa program publik tidak hanya dinilai dari aspek teknis tetapi juga dari persepsi dan kepuasan pengguna layanan.

Studi Terdahulu yang Relevan

Sejumlah penelitian telah mengkaji berbagai aspek yang relevan dengan topik ini. (Suarha et al., 2024) meneliti implementasi Peraturan Walikota di Cimahi, yang hasilnya menunjukkan pentingnya kejelasan petunjuk teknis bagi aparat pelaksana. Studi ini memberikan perspektif komparatif yang berguna. Selanjutnya, penelitian oleh (Saputra, Suarha, et al., 2024) mengenai inovasi layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung menyoroti

bagaimana inovasi dapat diimplementasikan dalam birokrasi lokal, sebuah temuan yang relevan untuk menganalisis inovasi sosial seperti "Kang Pisman". Sementara itu, beberapa studi lain telah mengevaluasi kualitas pelayanan publik di Kota Bandung (Kurniawati et al., 2023) dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai (Ningrum et al., 2023), yang menyediakan konteks mengenai kapasitas aparatur dalam menjalankan kebijakan.

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan, masih terdapat celah penelitian (*research gap*) dalam analisis yang spesifik mengenai implementasi program "Kang Pisman" di Kota Bandung dengan menggunakan kerangka kerja implementasi kebijakan yang komprehensif seperti model George C. Edwards III. Penelitian ini akan mengisi celah tersebut dengan menerapkan keempat variabel (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi) untuk membedah secara sistematis proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandung.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan holistik mengenai fenomena implementasi kebijakan program pengelolaan sampah di Kota

Bandung. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kompleksitas proses, interaksi antar aktor, dan konteks sosial yang melingkupi implementasi program "Kang Pisman". Fokus penelitian bukan pada pengukuran statistik, melainkan pada penggalian makna dan deskripsi yang kaya tentang bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di lapangan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen. Data primer tidak dikumpulkan secara langsung dari lapangan, melainkan analisis difokuskan pada sumber-sumber yang sudah ada. Sumber data meliputi dokumen-dokumen resmi pemerintah seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwal) terkait pengelolaan sampah, laporan tahunan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, serta data volume dan komposisi sampah yang dipublikasikan oleh lembaga terkait. Selain itu, digunakan pula artikel-artikel ilmiah, buku, tesis, dan berita dari media massa yang relevan dengan topik penelitian untuk memperkaya analisis.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*). Data yang terkumpul akan diorganisir, diklasifikasikan, dan dianalisis berdasarkan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Setiap data akan dikaitkan

dengan empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Proses analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, menjelaskan hubungan antar variabel, dan menarik kesimpulan yang sistematis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program pengelolaan sampah di Kota Bandung. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai subjek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai implementasi kebijakan program pengelolaan sampah di Kota Bandung dianalisis menggunakan kerangka kerja George C. Edwards III, yang mencakup empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Analisis ini didasarkan pada data sekunder yang berasal dari dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dan literatur relevan lainnya.

Komunikasi: Transmisi Kebijakan kepada Implementor dan Publik

Variabel komunikasi dalam model Edwards III menekankan pentingnya penyampaian informasi yang jelas, akurat, dan konsisten dari pembuat kebijakan kepada pelaksana. Dalam konteks pengelolaan sampah di Kota Bandung, komunikasi kebijakan diwujudkan melalui beberapa saluran. Pertama, landasan hukum seperti Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 dan

berbagai Perwal menjadi medium utama untuk mentransmisikan tujuan, sasaran, dan mekanisme program. Dokumen-dokumen ini secara eksplisit menguraikan kewajiban pemilahan sampah bagi setiap penghasil sampah dan peran pemerintah dalam memfasilitasi proses tersebut.

Kedua, Pemerintah Kota Bandung, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan UPTD Pengelolaan Sampah, secara aktif melakukan sosialisasi program "Kang Pisman". Sosialisasi ini menyasar berbagai tingkatan, mulai dari aparat kewilayahan (camat dan lurah) hingga langsung ke masyarakat melalui program-program seperti Sekolah Kang Pisman dan pembentukan Kawasan Bebas Sampah (KBS). Media sosial dan situs web resmi pemerintah juga dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi. Namun, hasil analisis dokumen dan laporan berita menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi masih belum merata. Meskipun secara konsep program "Kang Pisman" sudah cukup dikenal, pemahaman mendalam mengenai teknis pemilahan sampah (organik, anorganik, residu) di tingkat rumah tangga masih menjadi tantangan. Terjadinya distorsi informasi atau "noise" dalam penyampaian pesan dari tingkat kota ke tingkat RW dan RT berpotensi mengurangi kejelasan dan konsistensi, sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan warga.

Sumber Daya: Kapasitas dalam Pelaksanaan Kebijakan

Sumber daya merupakan faktor vital yang menentukan apakah implementor mampu melaksanakan kebijakan secara efektif. Analisis terhadap sumber daya dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandung menunjukkan adanya beberapa aspek krusial:

Sumber Daya Manusia: Kinerja pegawai di lingkungan pemerintah daerah menjadi tulang punggung keberhasilan program (Saputra, 2018). DLH Kota Bandung memiliki staf dan petugas kebersihan, namun jumlahnya sering kali tidak sebanding dengan luas wilayah dan volume sampah yang harus dikelola. Di tingkat KBS, keberhasilan sangat bergantung pada adanya relawan atau petugas pemilah yang didedikasikan, yang sering kali bersifat sukarela dan menghadapi tantangan keberlanjutan. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, seperti yang disarankan dalam penelitian (Kurniawati & Saputra, 2022), menjadi esensial untuk memastikan petugas memahami teknis pemilahan dan pengolahan sampah.

Anggaran: Pengelolaan sampah adalah sektor yang padat modal. Anggaran diperlukan untuk pengadaan infrastruktur (seperti TPS3R, komposter, kendaraan angkut terpilah), biaya operasional, dan program insentif bagi masyarakat. Keterbatasan anggaran daerah sering kali menjadi kendala dalam penyediaan fasilitas yang

memadai di seluruh wilayah kota, sehingga implementasi program menjadi tidak seragam.

Infrastruktur dan Fasilitas: Ini adalah tantangan terbesar. Krisis di TPA Sarimukti yang membatasi kuota penerimaan sampah dari Kota Bandung menunjukkan keterbatasan infrastruktur di tingkat regional. Di tingkat kota, jumlah TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle*) masih terbatas dan belum mampu mengolah seluruh sampah yang dihasilkan secara desentralisasi. Ketersediaan fasilitas pemilahan di sumber, seperti penyediaan tiga jenis tempat sampah di ruang publik dan perumahan, juga belum optimal.

Disposisi: Sikap dan Komitmen Pelaksana

Disposisi atau sikap para implementor sangat mempengaruhi kemauan mereka untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam kasus ini, implementor mencakup aparat pemerintah di berbagai tingkatan dan masyarakat itu sendiri. Dari sisi birokrasi, pimpinan daerah Kota Bandung menunjukkan komitmen politik yang kuat melalui peluncuran program "Kang Pisman" dan berbagai inovasi turunannya. Komitmen ini penting untuk menggerakkan mesin birokrasi. Studi oleh (Ningrum et al., 2023) menunjukkan bahwa kepemimpinan dan budaya organisasi di lingkungan Pemkot Bandung dapat mendorong perilaku kerja inovatif, yang

relevan untuk mendukung program seperti Kang Pisman.

Namun, di tingkat pelaksana lapangan, tantangan mungkin muncul terkait beban kerja tambahan atau kurangnya insentif, yang dapat mempengaruhi disposisi mereka. Dari sisi masyarakat, disposisi terhadap program pemilahan sampah bervariasi. Ada kelompok masyarakat yang proaktif dan sadar lingkungan, namun tidak sedikit pula yang masih apatis. Perubahan perilaku adalah proses jangka panjang yang dipengaruhi oleh kebiasaan, nilai, dan persepsi tentang manfaat langsung dari program tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah untuk mengelola sampah yang sudah terpilah dengan baik juga menjadi faktor kunci yang membentuk disposisi publik.

Struktur Birokrasi: Organisasi Pelaksana Kebijakan

Struktur birokrasi yang efektif ditandai dengan adanya SOP yang jelas dan koordinasi yang baik antar lembaga terkait. DLH Kota Bandung merupakan lembaga utama yang bertanggung jawab, dibantu oleh UPTD Pengelolaan Sampah. Pembagian kerja antara dinas yang menangani kebijakan dan UPTD yang berfokus pada operasional di lapangan secara teori sudah cukup jelas. Program KBS juga merupakan upaya untuk mendelegasikan sebagian tanggung jawab ke struktur yang lebih rendah di tingkat kewilayahan.

Namun, tantangan koordinasi tetap ada. Pengelolaan sampah adalah

isu lintas sektoral yang melibatkan tidak hanya DLH, tetapi juga dinas perindustrian (terkait sampah industri), dinas pariwisata (sampah dari hotel dan restoran), serta dinas pendidikan (edukasi di sekolah). Fragmentasi koordinasi antar dinas ini dapat menghambat pendekatan yang holistik. Selain itu, hubungan antara pemerintah kota, pemerintah provinsi (terkait pengelolaan TPA regional), dan pemerintah pusat (terkait kebijakan nasional) juga mempengaruhi efektivitas struktur birokrasi secara keseluruhan. Penelitian (Suarha et al., 2024) mengenai implementasi kebijakan di Cimahi menggarisbawahi bahwa kejelasan petunjuk teknis dalam SOP adalah kunci untuk menghindari kebingungan di tingkat pelaksana, sebuah pelajaran yang sangat relevan bagi program pengelolaan sampah yang melibatkan banyak pihak. Tanpa SOP yang terstandarisasi dan dipahami semua pihak, dari tingkat kota hingga RW, implementasi akan berjalan tidak konsisten.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis implementasi kebijakan program pengelolaan sampah di Kota Bandung menggunakan Model George C. Edwards III, penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama yang mencerminkan dinamika implementasi kebijakan lingkungan di Indonesia. Pertama, meskipun program "Kang Pisman" didukung oleh kerangka

regulasi yang kuat (Perda No. 9 Tahun 2018 dan berbagai Perwal), terdapat asimetri implementasi yang signifikan antara tingkat kebijakan dan tingkat operasional. Variabel komunikasi menunjukkan paradoks: sosialisasi dilakukan secara masif di tingkat makro, namun transmisi informasi teknis mengalami distorsi ketika mencapai tingkat mikro (rumah tangga), mengakibatkan kesenjangan antara kesadaran konseptual dan pemahaman praktis. Temuan ini mengonfirmasi proposisi Edwards III bahwa kejelasan dan konsistensi komunikasi merupakan prasyarat implementasi, sekaligus memperkaya literatur dengan menunjukkan bahwa dalam konteks desentralisasi pemerintahan Indonesia, komunikasi kebijakan menghadapi tantangan struktural berupa fragmentasi informasi di tingkat kewilayahan (kecamatan-kelurahan-RW-RT).

Kedua, dari sisi sumber daya, penelitian ini mengidentifikasi bottleneck kritis yang bersifat multi-dimensi: defisit kapasitas infrastruktur (726 ton sampah/hari tidak tertangani TPA), keterbatasan anggaran yang menyebabkan distribusi fasilitas TPS3R tidak merata, dan ketergantungan pada relawan/petugas sukarela di tingkat KBS yang mengancam keberlanjutan program. Temuan ini menggarisbawahi bahwa dalam konteks kota metropolitan berkembang seperti Bandung, inovasi kebijakan berbasis partisipasi masyarakat (seperti Kang Pisman) tidak

dapat menggantikan kebutuhan fundamental akan investasi infrastruktur, melainkan harus berjalan secara komplementer. Variabel disposisi menunjukkan dualitas: komitmen politik pimpinan daerah yang tinggi tidak otomatis ditranslasikan menjadi internalisasi nilai oleh seluruh lapisan implementor dan masyarakat. Resistensi pasif dalam bentuk apatis dan kebiasaan lama (business as usual) tetap dominan, mengonfirmasi bahwa perubahan perilaku kolektif memerlukan intervensi yang lebih kompleks daripada sekadar sosialisasi atau regulasi. Terakhir, struktur birokrasi yang secara formal telah terdefinisi (DLH dan UPTD) menghadapi tantangan koordinasi lintas sektoral yang mencerminkan persoalan klasik fragmentasi birokrasi Indonesia. Pengelolaan sampah sebagai isu yang inherently cross-cutting memerlukan mekanisme integrasi yang lebih kuat daripada sekadar pembagian tugas hirarkis.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan tiga kontribusi penting. Pertama, validasi kontekstual Model Edwards III: penelitian ini menunjukkan bahwa keempat variabel Edwards III tetap relevan dalam konteks kebijakan lingkungan di negara berkembang, namun dengan pola interaksi yang lebih kompleks daripada yang diasumsikan model linier. Keberhasilan implementasi tidak sekadar penjumlahan keempat variabel, melainkan memerlukan konfigurasi

optimal dan sinkronisasi temporal. Kedua, penelitian ini mengidentifikasi "faktor kelima" implisit: kapasitas adaptif sistem implementasi dalam merespons keterbatasan sumber daya melalui inovasi sosial (seperti KBS dan Sekolah Kang Pisman). Ini memperkaya model Edwards III dengan dimensi kreativitas institusional sebagai mediator antara keterbatasan struktural dan pencapaian tujuan kebijakan. Ketiga, temuan tentang defisit 726 ton/hari sampah yang tidak tertangani TPA memberikan bukti empiris kuantitatif tentang urgensi desentralisasi pengelolaan sampah, sesuatu yang sering diabaikan dalam studi implementasi kebijakan yang bersifat kualitatif-deskriptif.

Berdasarkan temuan di atas, beberapa rekomendasi dapat dirumuskan dengan mengaitkan setiap saran pada variabel spesifik dan temuan empiris penelitian. Pertama, terkait variabel komunikasi, Pemerintah Kota Bandung perlu mengadopsi strategi komunikasi berbasis lokalitas (*community-based communication*) dengan melatih kader lingkungan di setiap RW sebagai agen perubahan yang mampu menerjemahkan kebijakan teknis ke dalam bahasa dan konteks lokal. Temuan tentang distorsi informasi di tingkat RT menunjukkan perlunya pendekatan komunikasi dua arah dan partisipatif, bukan sekadar diseminasi top-down. Kedua, terkait sumber daya, mengingat defisit 726 ton/hari, alokasi anggaran untuk

pembangunan TPS3R harus diprioritaskan dengan target minimal satu unit per kelurahan pada tahun 2027, disertai insentif finansial dan non-finansial (seperti pengurangan retribusi sampah) bagi rumah tangga yang konsisten memilah sampah. Temuan tentang ketergantungan pada relawan menunjukkan perlunya institusionalisasi petugas pemilah dengan status dan kompensasi yang jelas untuk memastikan keberlanjutan program.

Ketiga, untuk memperkuat disposisi, berdasarkan temuan tentang resistensi pasif masyarakat, penegakan hukum (*law enforcement*) yang tegas namun edukatif terhadap pelanggaran kewajiban pemilahan sampah perlu diterapkan secara bertahap: dimulai dengan sanksi sosial (teguran dan pembinaan), kemudian sanksi administratif (denda), dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan prosedural. Mekanisme reward and punishment ini akan menciptakan insentif perilaku yang lebih efektif daripada sosialisasi semata. Keempat, terkait struktur birokrasi, temuan tentang fragmentasi koordinasi antar-dinas menunjukkan perlunya pembentukan *Task Force* Pengelolaan Sampah Terpadu yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah, dengan keanggotaan lintas SKPD (DLH, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata) dan perwakilan masyarakat, yang bertugas melakukan monitoring, evaluasi, dan

sinkronisasi program secara berkala. Struktur ini akan menjamin akuntabilitas kolektif dan mengurangi silo birokrasi.

Secara lebih luas, penelitian ini memberikan pelajaran penting bagi kota-kota lain di Indonesia yang menghadapi krisis sampah serupa: inovasi kebijakan berbasis partisipasi masyarakat hanya akan efektif jika didukung oleh ekosistem implementasi yang memadai, yang mencakup komunikasi yang jernih, sumber daya yang proporsional, disposisi positif yang dikultivasi secara sistematis, dan struktur birokrasi yang koheren. Model "Kang Pisman" Bandung dapat menjadi inspirasi, namun dengan catatan bahwa replikasi tidak boleh bersifat teknis-mekanistik, melainkan harus disesuaikan dengan kapasitas sumber daya dan karakteristik sosio-kultural masing-masing daerah. Keterbatasan penelitian ini, yakni penggunaan data sekunder yang membatasi pendalaman aspek perilaku dan dinamika lapangan, membuka peluang bagi penelitian lanjutan dengan pendekatan etnografi atau mixed-methods untuk menangkap kompleksitas implementasi secara lebih holistik. Demikian pula, studi komparatif dengan kota-kota lain yang mengimplementasikan program serupa akan memperkaya pemahaman tentang best practices dan contextual factors dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi Ke-2)*. Alfabeta.
- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Prentice-Hall.
- BPS Kota Bandung. (2023). *Kota Bandung dalam angka 2023*.
- Destriana, W. H., Sugandi, Y. S., & Saputra, G. W. (2023). PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT DAN TATA KELOLA PEMERINTAH TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GARUT. *ALIGNMENT: Journal of Administration and Educational Management*, 6(2), 303–313. <https://doi.org/10.31539/alignment.v6i2.7016>
- Dewi, T. G., Saputra, G. W., & Istikomah. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Kartu Keluarga dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Tengah. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(1), 75–79. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i1.4135>
- Dewi, Y. F., Susilawati, S., & Saputra, G. W. (2024). The Effect of Enforcement Of Mayor Regulation No. 888 Of 2012 On Street Vendors' Compliance (PKL) In Bandung Kulon Distric. *Pasundan*

- Social Science Development (PASCIDEV)*, 5(1), 95–103.
<https://doi.org/https://doi.org/10.56457/pascidev.v5i1.191>
- DLH Kota Bandung. (2022). *Laporan kinerja pengelolaan sampah Kota Bandung tahun 2022*.
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Kurniawati, K., Rusdianti, I. S., Saputra, G. W., & Kanjanamethakul, K. (2023). How is the Condition of Health Services at the UPT Puskesmas Griya Antapani Bandung City? *Innovation Business Management and Accounting Journal*, 2(1), 14–20.
<https://doi.org/10.56070/ibmaj.v2i1.30>
- Kurniawati, & Saputra, G. W. (2022). Peningkatan keunggulan bersaing wirausaha melalui pelatihan SDM dan kemampuan manajemen. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(5), 2283–2290.
<https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4iSpesial Issue 5.2332>
- Ningrum, M. A., Surtiani, A., & Saputra, G. W. (2023). Peran Organizational Citizenship Behavior Dalam Memediasi Pengaruh Transformational Leadership Terhadap Innovative Work Behavior (Studi Pada Dinas Kesehatan Kota Bandung). *Journal of Management Studies and Entrepreneurship (MSEJ)*, 4(5), 6015–6027.
<https://doi.org/10.37385/msej.v4i5.3202>
- Rahmania, N., Sahromi, & Saputra, G. W. (2024). Pengaruh Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Bagian Umum Setda Kota Cimahi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(1), 69–74.
<https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i1.4134>
- Saputra, G. W. (2018). Pengaruh Motivasi Dan Disiplin Kerja Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Bina Administrasi (JBA)*, VI(01), 16–30.
<https://stiabandung.ac.id/wp-content/uploads/2020/08/Isi-V6-N1-2.pdf>
- Saputra, G. W., Kurniawati, K., & Susilawati, S. (2025). *Manajemen Pemerintahan Daerah dan Desa: Konsep Dinamika dan Implementasi di Indonesia (Pertama)*. CV. Dewa Publishing.
- Saputra, G. W., Kurniawati, K., Susilawati, S., Suarha, C., & Triadi, R. (2024). *Administrasi Publik (Pertama)*. PT. Mafy Media Literasi Indonesia.
- Saputra, G. W., Suarha, C., Triadi, R., & Sarihati, T. (2024). Innovation Of Death Certificate Services At The Department Of Population And Civil Registration Of Bandung

- City , West Java. *Proceedings of International Conference on Social, Politics, Administration, and Communication Sciences*, 1(2), 138–150.
<https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/ICoSPACS/article/view/2413>
- Suarha, C., Triadi, R., Saputra, G. W., & Santosa, P. (2024). Implementation Of Cimahi Mayor Regulation No. 36 Of 2015 On Technical Guidelines For The Rehabilitation Of Unhabilitable Houses In Cimahi City. *Proceedings of International Conference on Social, Politics, Administration, and Communication Sciences*, 1(2), 167–188.
<https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/ICoSPACS/article/view/2415>
- Sulistiani, D. S., Sindrawati, S., & Saputra, G. W. (2024). Apakah Disiplin Kerja yang Bagus akan Meningkatkan Kinerja Pegawai? *YUME : Journal of Management*, 7(2), 1193–1199.
<https://doi.org/10.37531/yum.v7i2.7120>
- Tchobanoglous, G., Theisen, H., & Vigil, S. A. (2021). *Integrated Solid Waste Management: Engineering Principles and Management Issues* (3rd ed.). McGraw-Hill Companies, Incorporated.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
<https://doi.org/10.1177/009539977500600404>